

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *whistleblowing system* yang dimiliki BPK guna menjadi salah satu alat dalam penegakkan nilai-nilai dasar oleh pelaksana BPK RI. Penelitian ini dilakukan di Gedung BPK RI Jalan Jendreal Gatot Subroto. Peneliti telah melakukan penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, serta telah melalui proses uji triangulasi sehingga mendapatkan kesimpulan:

1. Nilai-nilai dasar BPK RI sudah menjadi patokan bagi seluruh pelaksana dan anggota BPK RI dalam bekerja serta nilai-nilai dasar dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu,
2. Penerapan *whistleblowing* sebagai alat pembantu bagi pelaksana dan anggota BPK dalam memenuhi nilai-nilai dasar serta menjadi sistem pengendalian internal tambahan sudah berjalan dengan baik di mana adanya rasa takut yang dimunculkan oleh eksistensi sistem *whistleblowing* berbasis internet sehingga memudahkan siapa saja untuk melaporkan ke pihak Penegakkan Integritas,
3. Pemanfaatan sistem pelaporan berbasis full disclosure dan anonim sudah dimanfaatkan sebaik mungkin oleh ITAMA dengan upaya penjagaan rahasia tingkat tinggi,
4. Pemanfaatan sistem rewarding masih harus diberikan perhatian khusus bagi BPK secara keseluruhan serta pembaharuan terhadap Surat Keputusan Sekeratis Jenderal yang mengatur *whistleblowing system* dan perlindungan bagi whistleblower,
5. Secara umum, penerapan *whistleblowing system* di BPK RI sudah berjalan dengan cukup efektif dan memadai, namun belum optimal. Hal ini dapat disimpulkan dari pernyataan ketiga narasumber yang memiliki inti jawaban yang sama mengenai keefektivitasan *whistleblowing* dalam menegakkan nilai dasar. Serta kata efektif sendiri merupakan kata yang luas untuk didefinisikan.

Sejauh ini BPK sudah dapat menjalankan dan memberikan output yang diharapkan dari whistleblowing system,

6. Whistleblowing yang berlaku belum optimal karena masih terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh auditor BPK di mana beberapa kasus tidak dapat dideteksi oleh pihak ITAMA terlebih dahulu sebelum kasusnya meledak ke public serta terjadi di tahun-tahun setelah whistleblowing berbasis internet dipatenkan pada tahun 2013, sehingga belum optimal dalam menjadi Early Warning System di mana hal tersebut dapat berpotensi merusak citra dan martabat BPK,
7. Penerapan whistleblowing berbasis internet sudah semekian rupa disempurnakan oleh biro TI dan ITAMA,
8. Keefektifitasan *whistleblowing system* BPK apabila diukur dengan tingkat keefektifan menurut buku Memahami *Whistleblowing*, sudah sesuai. Dimulai dengan tersosialisasinya sistem whistleblowing, otoritas penerima laporan yang sudah jelas akan diterima oleh Penegakkan Integritas, kerahasiaan yang sudah terjamin dengan terbatasnya administrator wbs, serta perlindungan dari segi identitas dan diri dengan kehati-hatian pihak Penegakkan Integritas dalam menyelidiki kasus yang dilaporkan.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dan temuan yang telah diuraikan diatas, peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Keterbatasan peneliti dalam menggali informasi sebaik mungkin dan mengkomunikasikan maksud dan tujuan pertanyaan secara baik,
2. Peneliti memiliki keterbatasan waktu untuk pengumpulan data, karena adanya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lokasi penelitian,
3. Keterbatasan narasumber, karena adanya virus wabah covid-19 yang membatasi akses untuk dilakukannya pertemuan dengan banyak orang serta kesibukan yang dijalani BPK dalam mengaudit dana Covid-19 serta keterbatasan dalam menjangkau narasumber,

Rahmita Syania Putri, 2021

Efektivitas Whistleblowing System Dalam Pemenuhan Nilai-Nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Sarjana

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

4. Keterbatasan dokumen yang didapatkan oleh peneliti karena tidak semua dokumen pelaksanaan program bantuan sosial itu bersifat publik.

6.3 Saran

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan serta kesimpulan dan keterbatasan peneliti. Maka peneliti memberikan saran-saran yang diberikan kebeberapa pihak:

1. Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya agar mempelajari secara lebih terinci dan mendalam mengenai BPK secara organisasi, ITAMA sebagai organisasi di mana peneliti selanjutnya diharapkan dapat memahami BPK secara lebih mendalam baik dari segi tugas dan organisasi, serta memahami bagaimana dari Inspektorat Utama selain dari Penegakkan Integritas guna memberikan gambaran lebih lanjut mengenai SPI yang ada di dalam BPK. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan mendalami *whistleblowing system* itu sendiri baik sebagai teori ataupun praktiknya terhadap tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi di BPK sebagai penambah dalam menunjang keefektifitasan *whistleblowing system* BPK. Baik secara kuantitatif dan kualitatif.

2. Saran Praktis

Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk BPK melakukan beberapa hal di bawah ini:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan *whistleblowing system* melalui banyak saluran,
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya sehingga diharapkan kerjasama ini akan mampu memberikan nilai tambah dan perbaikan *whistleblowing system* di BPK,
- c. Evaluasi *whistleblowing system* oleh pihak independen, walaupun telah dilakukan evaluasi oleh pihak internal yang dilakukan secara self assessment serta quality assurance yang dilakukan oleh ITAMA, ada baiknya BPK juga melakukan audit Teknologi Informasi secara berkala

dengan melibatkan pihak KAP yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan BPK,

- d. BPK melakukan review atas beban kerja yang dihadapi oleh pihak pengelola *whistleblowing system* ataupun jumlah pekerja yang menangani laporan yang masuk ke dalam BPK.